

LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022

RRI
Saksi di Udara Terdekat di Udara

PPID

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA

**PUSAT
LAYANAN INFORMASI
DAN
DOKUMENTASI**

WAKTU LAYANAN
SENIN s.d KAMIS : 09.00 - 15.00
ISTIRAHAT : 12.00 - 13.00
JUMAT : 09.00 - 15.30
ISTIRAHAT : 11.30 - 13.30

APA ITU
INFORMASI PUBLIK

Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola,
dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan
dengan penyelenggaraan dan penyelenggaraan urusan
pemerintahan badan publik lainnya.

ppid.ri.co.id

Suaranya Dengan
A Rikaya di DRI

**INFORMATIF
KATEGORI LN - LPNK**

177	Forum Masyarakat Kelembagaan Indonesia	24.300
178	Rakor Pengorganisasian Asosiasi Sosial Masyarakat	24.300
179	Lembaga Kelengkapan Penyelenggaraan Manajemen Pemerintahan	24.300
180	Forum Kelembagaan Indonesia	24.300
181	Makalah Kelembagaan	24.300
182	Lembaga Kelembagaan Indonesia	24.300
183	Forum Kelembagaan Indonesia	24.300

**INFORMATIF
KATEGORI LN - LPNK**

177	Forum Masyarakat Kelembagaan Indonesia	24.300
178	Rakor Pengorganisasian Asosiasi Sosial Masyarakat	24.300
179	Lembaga Kelengkapan Penyelenggaraan Manajemen Pemerintahan	24.300
180	Forum Kelembagaan Indonesia	24.300
181	Makalah Kelembagaan	24.300
182	Lembaga Kelembagaan Indonesia	24.300
183	Forum Kelembagaan Indonesia	24.300



[HTTPS://PPID.RRI.CO.ID/](https://ppid.ri.co.id/)

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada ALLAH SWT atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lembaga Penyiaran Publik RRI Tahun 2022 dapat tersusun dan terselesaikan sebagaimana mestinya.

Penyusunan Laporan Tahunan ini adalah rekapitulasi pelayanan informasi publik sepanjang Tahun 2022 sebagai bentuk pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lembaga Penyiaran Publik RRI yang tertuang melalui Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Tim Penyusun Laporan Pelayanan Informasi Pada PPID Lembaga Penyiaran Publik RRI.

Laporan Layanan Informasi Publik yang telah tersusun ini tidaklah sempurna, oleh sebab itu kami membuka diri untuk segala jenis saran dan masukan agar penyusunan laporan tahunan selanjutnya dapat tersusun dengan lebih baik lagi.

Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Lembaga Penyiaran Publik RRI,

Yonas Markus Tuhuleruw

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
A. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di LPP RRI	1
B. Bidang Pelayanan Informasi	2
C. Bidang Pengelola Informasi	5
D. Rincian Pelayanan Permohonan	20
E. Penutup	23

A. KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LPP RRI

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban Badan Publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi, salah satu kewajiban Badan Publik yang terkait dengan implementasi UU No. 14 Tahun 2008 adalah wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Bulan Januari Tahun 2016 merupakan langkah awal Persiapan Implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008 Di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Direktur Utama Selaku Atasan PPID LPP RRI memberi instruksi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dalam hal ini dipimpin oleh Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha, untuk menyusun struktur organisasi serta membuat Buku Pedoman PPID sebagai petunjuk pelayanan informasi di lingkungan LPP RRI.

Penerbitan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor 244 Tahun 2016 Tentang Organisasi PPID LPP RRI tanggal 10 Maret 2016. Direktur Utama RRI Mengeluarkan Peraturan Direktur Utama Nomor : 04 Tahun 2016 Tentang Buku Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Pada Tanggal 16 Maret 2016.

Keputusan tersebut merupakan landasan operasional bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan LPP RRI sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

PPID bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik. Dalam menjalankan tugas fungsinya, PPID dibantu oleh para petugas layanan informasi.

Guna mempercepat penanganan permohonan layanan informasi di lingkungan LPP RRI, PPID menetapkan SOP Pengelolaan Layanan Informasi Publik yang terdiri dari:

- (1) SOP Pelayanan Informasi Melalui Front Desk atau Meja Informasi;
- (2) SOP Pelayanan Informasi Melalui Website ppid.rii.co.id;
- (3) SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik;
- (4) SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik dan Penetapan Daftar Informasi Dikecualikan;
- (5) SOP Penanganan Pengajuan Keberatan Informasi Publik;
- (6) SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik;
- (7) SOP Penyediaan dan Pengunggahan Informasi Publik pada Portal;
- (8) SOP Petugas Desk Layanan Informasi Publik.

Selain SOP, petugas layanan juga diberikan panduan berupa Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK).

Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) bersifat dinamis dan dapat dimutakhirkan setiap saat apabila diperlukan terkait dengan jangka waktu pengecualian dan/ atau sifat suatu informasi dan/atau terdapat penambahan atau pengurangan data.

B. BIDANG PELAYANAN INFORMASI

Bidang Pelayanan Informasi, LPP RRI melalui Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha selaku pejabat ex-officio menerbitkan Nota Dinas pada bulan April 2016 Kepada Kepala Satuan Kerja LPP RRI di seluruh Indonesia untuk menyediakan Front Desk PPID (meja Informasi) untuk melayani informasi kepada publik di Satker masing-masing.



Operasional pelayanan permohonan informasi 2publiksecara langsung melalui front desk PPID RRI yang berada di Lantai 6 Gedung RRI Jakarta Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 4-5 Jakarta Pusat dilaksanakan pada :

Senin – Selasa : 08:00 – 16.00
Rabu – Kamis : 08:00 – 16.00
Jumat : 08.00 – 11:00, 13.00 – 16:00
Sabtu – Minggu : Tutup

atau secara online melalui layanan permohonan informasi PPID yang tersedia di website: <https://ppid.rri.co.id/>

Gambar Alur Permohonan Informasi Publik



Keterangan :

1. Pemohon menyampaikan formulir permohonan informasi
2. Petugas Pelayanan Informasi menerima dan memverifikasi permohonan informasi publik
3. PPID memberikan jawaban sesuai ketentuan yang berlaku
4. Pemohon informasi menerima jawaban atas permohonan informasi, proses berakhir apabila pemohon puas atas jawaban dari PPID.
5. Pemohon yang tidak puas atas jawaban PPID dapat menyampaikan keberatan
6. PPID memberikan jawaban atas keberatan permohonan informasi
7. Proses berakhir apabila pemohon puas atas jawaban keberatan
8. Pemohon informasi yang tidak puas atas jawaban keberatan PPID dapat mengajukan sengketa melalui Komisi Informasi

Gambar Layanan Informasi Secara Online



Gambar Layanan Informasi Secara Online

The screenshot shows the website of the Public Information Commission (PPID) of the Indonesian Broadcasting Commission (KPI). The page displays a decision document titled "KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA NOMOR 1534 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN PETA PROSES BISNIS PADA LPP RRI". The document details include: PPID: PPID Pusat, Kode: JPPID-RR/1/150622-161217-2, and a description: "KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA NOMOR 1534 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN PETA PROSES BISNIS PADA LPP RRI" dated 30 June 2021. A red arrow points to the statistics: "Dilihat: 28 kali" (Viewed: 28 times) and "Didownload: 48 kali" (Downloaded: 48 times). A "Download" button is visible at the bottom right.

The screenshot shows the website of the Public Information Commission (PPID) of the Indonesian Broadcasting Commission (KPI). The page displays a survey report titled "Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Jasa Penyiaran LPP RRI Tahun 2021". The document details include: PPID: PPID Pusat, Kode: JPPID-RR/1/031221-110552-1, and a description: "Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Jasa Penyiaran LPP RRI Tahun 2021". A red arrow points to the statistics: "Dilihat: 51 kali" (Viewed: 51 times) and "Didownload: 31 kali" (Downloaded: 31 times). A "Download" button is visible at the bottom right.

The screenshot shows the website of the Public Information Commission (PPID) of the Indonesian Broadcasting Commission (KPI). The page displays a public information document titled "Keputusan PPID JPPAR". The document details include: Open time: 26 Desember 2022 - update oleh: 27 Desember 2022, and a status of "Dijawab" (Answered). A red arrow points to the "Dijawab" status. A "Download" button is visible at the bottom right.

C. BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI

Bidang Pengelolaan Informasi, di bulan April 2016, RRI telah membuat website ppid.rri.co.id sebagai upaya mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi tentang RRI.

LPP RRI menggelar Bimbingan Teknis PPID yang diikuti oleh Kepala RRI seluruh Indonesia pada tanggal 24 s/d 26 April 2016 di Bogor.



Bidang Pengelolaan Informasi : Sejak bulan Mei 2016, RRI menggelar Bimbingan Teknis kepada pengelola/operator PPID, diantaranya ; tanggal 16 s/d 17 Mei 2016 di Yogyakarta (se Jawa dan Bali), tanggal 26 s/d 28 Mei 2016 di Makassar (Wilayah Timur) dan tanggal 20 s/d 22 Juni 2016 (Wilayah Barat)

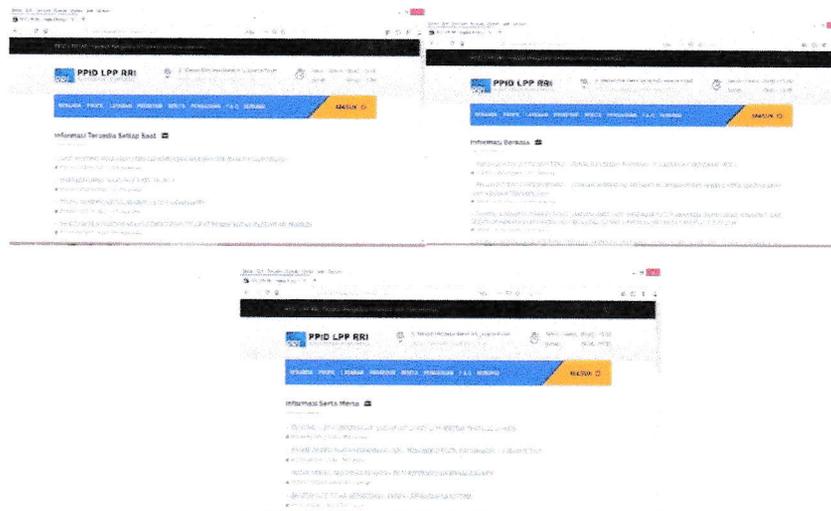


Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha / Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi kembali menggelar Rapat Kerja Optimalisasi PPID di Lingkungan LPP RRI pada tanggal 18 Nopember 2016 di Kendari.



Pengelola PPID di Setiap Satker LPP RRI melakukan input data ke website <https://ppid.rri.co.id>

Peningkatan ketersediaan informasi publik di website ppid.rri.co.id pada tahun 2017 sebanyak \pm 1.000 dokumen menjadi \pm 4.000 dokumen di tahun 2019. Sementara di tahun 2020 meningkat menjadi 10.000 dokumen dan Di tahun 2021 bertambah menjadi 20.000 dokumen (baik itu informasi publik yang wajib disediakan setiap saat, informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala, maupun informasi publik yang wajib diumumkan serta merta)



Direktur Utama LPP RRI/Atasan PPID kembali menerbitkan Surat Keputusan Nomor 03 Tahun 2022 tentang Organisasi Pengelola Informasi Dan Dokumentasi LPP RRI pada tanggal 3 Januari 2022.



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 03 TAHUN 2022

TENTANG

ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR UTAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang
- Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, transparansi, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia perlu melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - Bahwa untuk melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka diandaikan perlu membentuk organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
- Mengingat
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
 - Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008
 - Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
 - Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
- MEMUTUSKAN
- Pertama
- Kedua
- Memberituk Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini.
- Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi LPP RRI bertanggungjawab di bidang pengelolaan informasi

publik meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan LPP RRI

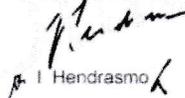
Ketiga Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi LPP RRI terdiri dari : Atasan PPID, PPID Utama, PPID Pelaksana, Bidang-bidang dan Pejabat Fungsional. Pejabat Fungsional ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan PPID Utama

Keempat Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Kantor Pusat RRI Tahun Anggaran 2022

Kelima Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan Di Jakarta
 Pada Tanggal 7 Januari 2022

Direktur Utama LPP RRI



Hendrasmo

Terbaca, Yth :

1. Kepala Dewan Pengawas LPP RRI
2. Direktur Program dan Produksi LPP RRI
3. Direktur SDM dan Umum LPP RRI
4. Direktur TMB LPP RRI
5. Direktur Keuangan LPP RRI
6. Kepala SPI LPP RRI
7. Kepala Pusat Pemberitaan LPP RRI
8. Kepala Pulitbangdiklat LPP RRI
9. Kepala Siaran Luar Negeri LPP RRI
10. Kepala Stasiun LPP RRI Tipe A, B dan C
11. Yang Bersangkutan
12. Arsip

Lampiran Keputusan : Direktur Utama LPP RRI
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 3 Januari 2022
Tentang : Organisasi Pengelola Informasi
Dan Dokumentasi LPP RRI

- | | | |
|---|--|--|
| 1 | Atasan PPID | Direktur Utama |
| 2 | PPID Utama | Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha
Para Direktur LPP RRI |
| 3 | PPID Pelaksana | Kepala Puslitbangdiklat
Kepala Stasiun SLN
Kepala Pusat Pembertaan
Kepala Stasiun Penyiaran Tipe A, B dan C |
| 4 | Bidang Pengelola Informasi
PPID Utama
Asisten Bidang Pengelola Informasi
PPID Pelaksana | Bidang Komunikasi Publik - JFT Pranata Humas
Ahli Madya Dit LPU
Bidang Wilayah I - SPI
Bidang Litbangdiklat - Puslitbangdiklat
Bidang Media Online - Pusat Pembertaan
Bidang Pembertaan - SLN
Bidang/Seksi LPU - RRI Tipe A, B dan C |
| 5 | Bidang Pelayanan Informasi
PPID Utama
Asisten Bidang Pelayanan Informasi
PPID Pelaksana | Bidang Pelayanan Publik - JFT Pranata Humas Ahli
Madya Dit LPU
Bidang Wilayah II - SPI
Subbag Umum - Puslitbangdiklat
Subbag Peng. Prog. Media Online - Puspem
Seksi Kerjasama Siaran - SLN
Bidang/Seksi LPU - RRI Tipe A, B dan C |
| 6 | Bidang Dokumentasi dan Arsip
Asisten Bidang Dokumentasi & Arsip
PPID Pelaksana | Bidang Kerjasama dan Multimedia - Dit. PP
Bagian SDM dan Umum
Bagian Dokumentasi & Kearsipan - Puspem
Bagian Peng. Program Media Online - Puspem
Seksi Kerjasama SLN
Bidang/Seksi LPU - RRI Tipe A, B dan C |
| 7 | Bidang Pengaduan dan
Penyelesaian Sengketa
PPID Utama
Asisten Bidang Pengaduan dan
Penyelesaian Sengketa
PPID Pelaksana | Bagian Hukum dan Umum - Dit. SDM dan Umum

Kabag TU - SPI
Kabag TU - Puslitbangdiklat
Kabag TU - Puspem
Kabag TU - SLN
Kabag/Kasubag TU RRI Tipe A, B dan C |

Ditetapkan Di Jakarta
Pada Tanggal 3 Januari 2022

Direktur Utama LPP RRI

I. Hendrasmi

Bimbingan Teknis Penguatan Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID LPP RRI (Satker Se-Sumatera) pada tanggal 26 sampai dengan 28 September 2019 di Padang, Sumatera Barat. Bimtek ini menghadirkan narasumber diantaranya ;

Cecep Suryadi (Komisioner Komisi Informasi Pusat)
Dedi Suparman (Kepala SPI LPP RRI)
Hugo Lidero (Web Development ppid.rrr.co.id)
Andi Permadi Kencono Wulan (Kabid TMB Puspem)



Pada tanggal 11 sampai dengan 13 Maret 2020 Bidang Pengelola PPID LPP RRI kembali melakukan Bimbingan teknis terkait Pembaruan Web, Pelayanan dan Pengolahan Data yang berlangsung di Jambi. Bimtek ini dihadiri oleh Seluruh Operator/petugas penginput informasi publik dan Kepala Bidang LPU Se-Indonesia. Bimtek ini menghadirkan narasumber diantaranya ;
Cecep Suryadi (Komisioner Komisi Informasi Pusat),
Aditya Nuriya S (Staf Ahli Komisi Informasi Pusat)
dan Hugo Lidero (Web Development).



Adapun kegiatan Rapat Koordinasi yang dilaksanakan oleh PPID LPP RRI Di Tahun 2021 sebagai berikut ;

Dalam rangka peringatan Hari Hak Untuk Tahu Sedunia, Direktorat Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI menggelar Workshop Keterbukaan Informasi Publik yang berlangsung pada tanggal 28 sampai dengan 30 September 2021 di Takengon, Aceh Tengah. Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha, Anhar Achmad menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian daripada peringatan International Right to Know Day di LPP RRI. Anhar Achmad menambahkan kegiatan Workshop ini dimaksudkan dalam rangka optimalisasi PPID Pelaksana LPP RRI di Provinsi Banda Aceh dan Sumatera Utara. Workshop Keterbukaan Informasi Publik kali ini menghadirkan narasumber diantaranya ; Kepala Dinas Kominfo Aceh Tengah, Khairuddin Yus dan Rektor UIN Gajah Putih Takengon, Zulkarnain.



PPID LPP RRI kembali menggelar kegiatan Bimbingan Teknis Layanan dan Pengelolaan Informasi Publik yang berlangsung pada tanggal 20 sampai dengan 22 Agustus 2021 di Bogor Jawa Barat. Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI, Anhar Achmad selaku PPID Utama RRI mengatakan kegiatan ini merupakan agenda rutin dalam rangka menyamakan persepsi dan optimalisasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Hadir sebagai Narasumber dalam Bimbingan Teknis PPID RRI diantaranya : Arif Adi Kuswardono - Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, Wafa Patria Umma - Ketua Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi, M. Syahyan - Ketua Bidang Regulasi, dan Kebijakan Publik.



Lembaga Penyiaran Publik RRI kembali melakukan koordinasi dalam rangka memastikan pelaksanaan keterbukaan informasi publik berjalan dengan baik. Dalam rapat yang berlangsung pada tanggal 4 hingga 6 Agustus 2021 di Sentul City, Jawa Barat. PPID Utama LPP RRI Anhar Achmad mengatakan pihaknya terus berupaya untuk menjamin hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik serta komitmen dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Hadir dalam Rapat Koordinasi diantaranya, Anggota Dewas RRI, Frederik Ndolu, Direktur Program dan Produksi, Soleman Yusuf, Kepala RRI Jakarta Enderiman Butar-butar, Kepala Pusat Pemberitaan, Widhie Kurniawan, Kapuslitbangdiklat, Adi Pramono, Kepala SPI, Dedi Suparman, Kepala Bidang Komunikasi Publik, Siti Saraswulan, Kepala Bidang Layanan Publik, Syarifuddin serta para JFT di Lingkungan Direktorat LPU.



Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha RRI, Anhar Achmad membuka Bimbingan Teknis "Aplikasi Layanan Informasi Publik Berbasis Android Serta Penyediaan dan Pelayanan Informasi Publik Khusus Penyandang Disabilitas Sensorik Netra" yang berlangsung pada tanggal 22 hingga 24 Maret 2021 Di Hotel Kuta Paradiso Denpasar Bali. Selain Kepala RRI Denpasar Nawir Nawihu, Bimtek PPID LPP RRI ini juga menghadirkan beberapa narasumber yakni ; Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Hendra J Kede, Kepala Balai Literasi Braile Indonesia, Isep Sepriyan dan Web Development Hugo Lidero.



Tahun 2022 PPID Utama LPP RRI, Yonas Markus Tuhuleruw, yang sekaligus menjabat Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI, membuka secara resmi pelaksanaan Bimbingan Teknis Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik serta Sosialisasi Penyediaan dan Pelayanan Informasi Publik Khusus Bagi Penyandang Disabilitas Sensorik Rungu Wicara yang berlangsung pada 30 Mei - 1 Juni 2022 di Manado, Sulawesi Utara.

Tahun 2022 ini PPID LPP RRI kembali lakukan inovasi melalui penyediaan dan pelayanan informasi publik khusus bagi penyandang disabilitas sensorik rungu wicara berkolaborasi dengan Badan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Sensorik Rungu Wicara "Melati" Kemensos RI untuk melayani masyarakat berkebutuhan khusus dalam rangka memenuhi amanat konstitusi.



Rapat Koordinasi & Sosialisasi PERKI No. 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Serta Penyediaan & Pelayanan Informasi Publik Bagi Penyandang Disabilitas Sensorik Rungu Wicara PPID LPP RRI di Bogor tanggal 29-31 Agustus 2022. Rapat Koordinasi PPID LPP RRI ini diikuti oleh seluruh PPID Pelaksana RRI di Seluruh Indonesia, dengan menghadirkan beberapa narasumber diantaranya : Komisioner Informasi Pusat Republik Indonesia Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi, Ibu Hj. Samrotunnajah Ismail, SE., M.Si. dan Kepala Sentra Mulya Jaya, Andrianus Alla, S.ST.



PPID LPP RRI secara aktif mengikuti kegiatan keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh Kementerian atau Lembaga, diantaranya Menghadiri Penyusunan Rancangan Peraturan BPOM Tentang Standar Layanan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh BADAN POM RI pada tanggal 3 Agustus 2022, Di Bekasi, Jawa Barat.



PPID Utama LPP RRI, Yonas Markus Tuhuleruw menerima kunjungan Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Ibu Hadi Wahyuningrum, SH., MM. dalam rangka konsultasi terkait studi banding website PPID LPP RRI Senin 11 Juli 2022 di Ruang Rapat Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha di Jakarta.



BADAN PELINDUNG PEKERJA MIGRAN INDONESIA
SEKRETARIAT UTAMA
 Jl. MT Haryono No. 10, Paroban, Cengkareng, Jakarta 10110
 Telp: (021) 50100100 Fax: (021) 50100100 Website: www.bp2mi.go.id

Nomor: Und. 012/HB/HK/02/01/19/2022
 Lembaran: 1
 Hal: Pemohonan Konsultasi terkait Studi BANDING (Benchmarking) Website PPID LPP RRI

Jakarta, 11 Juli 2022

Kepada Yth:
Bapak Hendrasno
 Direktur Utama LPP RRI
 Atasan PPID Utama

di: Tempat

Dalam rangka pengembangan dan peningkatan PPID BP2MI perlu melakukan sharing knowledge dengan PPID dari Lembaga yang dinilai memiliki kelengkapan fungsi website PPID.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami bermaksud untuk berkoordinasi dan melakukan kunjungan ke LPP RRI (Radio Republik Indonesia (RRI) yang bermaksud meninjau praktik website Lembaga Publik dengan kualifikasi diformat dalam pengadagayaan Keterbukaan Informasi Publik, kunjungan tersebut akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal: Senin, 11 Juli 2022
 Waktu: 14.30 s.d selesai
 Tempat: Kantor LPP RRI (Radio Republik Indonesia)
 Jl. Meranti Merdeka Rantai Nomor 4-5, Jakarta Pusat - 10110

Demiikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum dan Humas

Hadi Wahyuningrum, S.H., M.M.
 NIP. 19670516 199863 2 001

Tersebutan Via:
 Sekretaris Utama BP2MI melalui surat

Atasan PPID Utama (Direktur Utama RRI) I. Hendrasmo dan PPID Utama LPP RRI (Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha) Yonas Markus Tuhuleruw menghadiri acara Uji Publik Keterbukaan Informasi Selasa 1 November 2022 Di Redtop Hotel Jakarta yang merupakan tahap akhir pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi KIP Tahun 2022.



Gambar Alur Pengolahan Data Informasi Publik

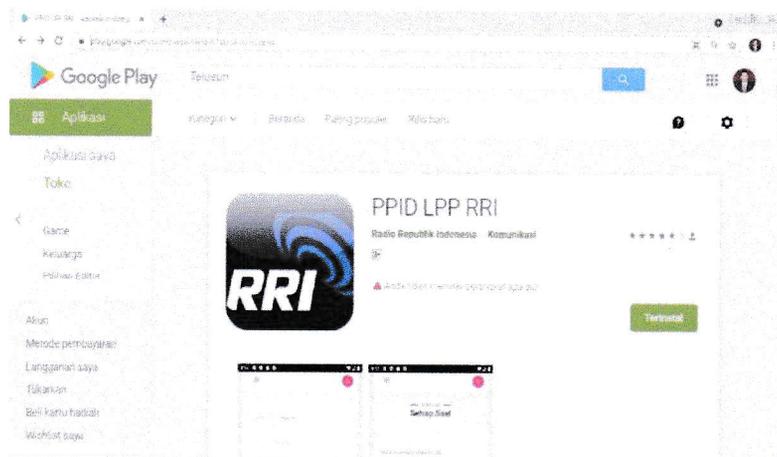


Pengelola PPID di Setiap Satker LPP RRI (PPID Pelaksana) melakukan pengiriman informasi publik dengan menginput data ke website <https://ppid.rri.co.id/> Peningkatan ketersediaan informasi publik di website ppid.rri.co.id pada tahun 2017 sebanyak ± 1.000 dokumen menjadi ± 4.000 dokumen di tahun 2019. Sementara di Tahun 2020 juga terjadi peningkatan ketersediaan informasi publik pada website ppid.rri.co.id semula ± 4.000 dokumen menjadi 10.000 dokumen informasi publik (baik itu informasi publik yang wajib disediakan setiap saat, informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala, maupun informasi publik yang wajib diumumkan serta merta).

Tahun 2020 PPID LPP RRI telah memiliki layanan informasi Publik Berbasis Android untuk memudahkan layanan informasi kepada masyarakat yang dapat diunduh melalui google playstore.

Sementara di Tahun 2021 PPID RRI juga telah memiliki layanan informasi publik berbasis iOS sistem operasi perangkat keras dari Apple, iPhone dan iPad.

<https://play.google.com/store/apps/details?id=id.co.ri.ppid>



Pada bulan September 2020 Bidang Pengelola Informasi Publik PPID RRI melakukan pengembangan Penyediaan dan Pelayanan Informasi Publik Khusus Bagi Penyandang Disabilitas Sensorik Netra melalui penyediaan informasi publik dengan huruf braile dan audio. Desember 2020 PPID LPP RRI seluruh Indonesia telah tersedia informasi publik khusus bagi penyandang disabilitas sensorik netra dalam bentuk Buku Braile dan Audio.

Foto Layanan Informasi Publik Khusus Penyandang Disabilitas Sensorik Netra di PPID Pelaksana RRI Bogor



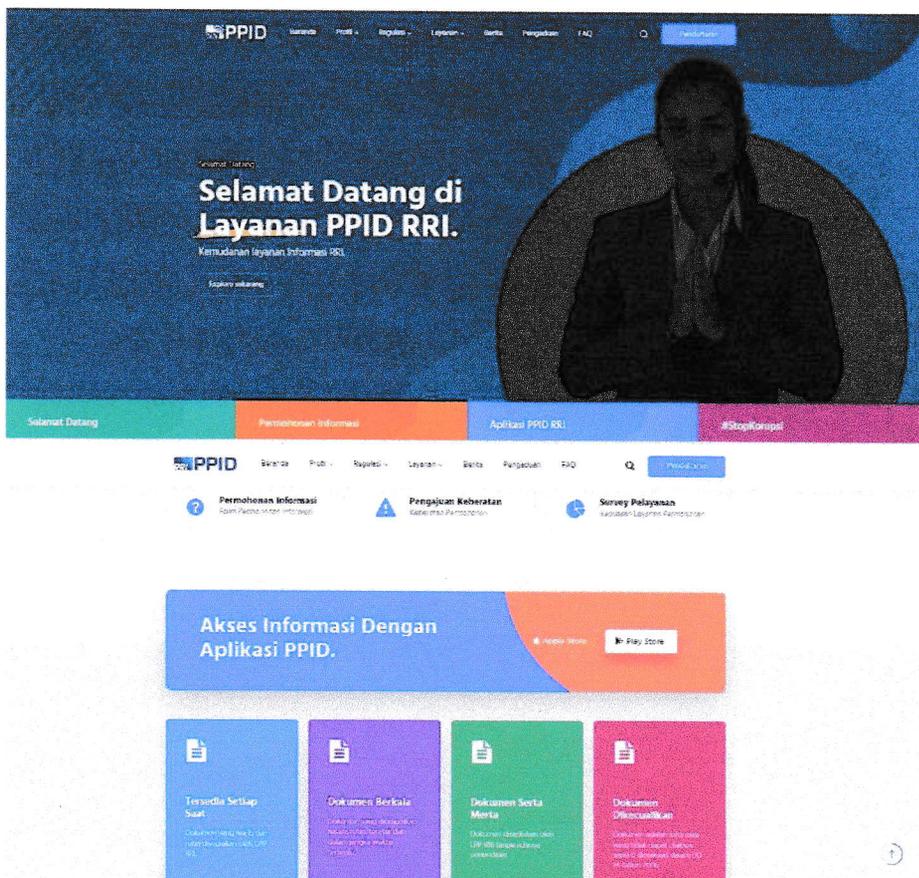
Foto Layanan Informasi Publik Khusus Penyandang Disabilitas Sensorik Netra di PPID Pelaksana RRI Bandar Lampung

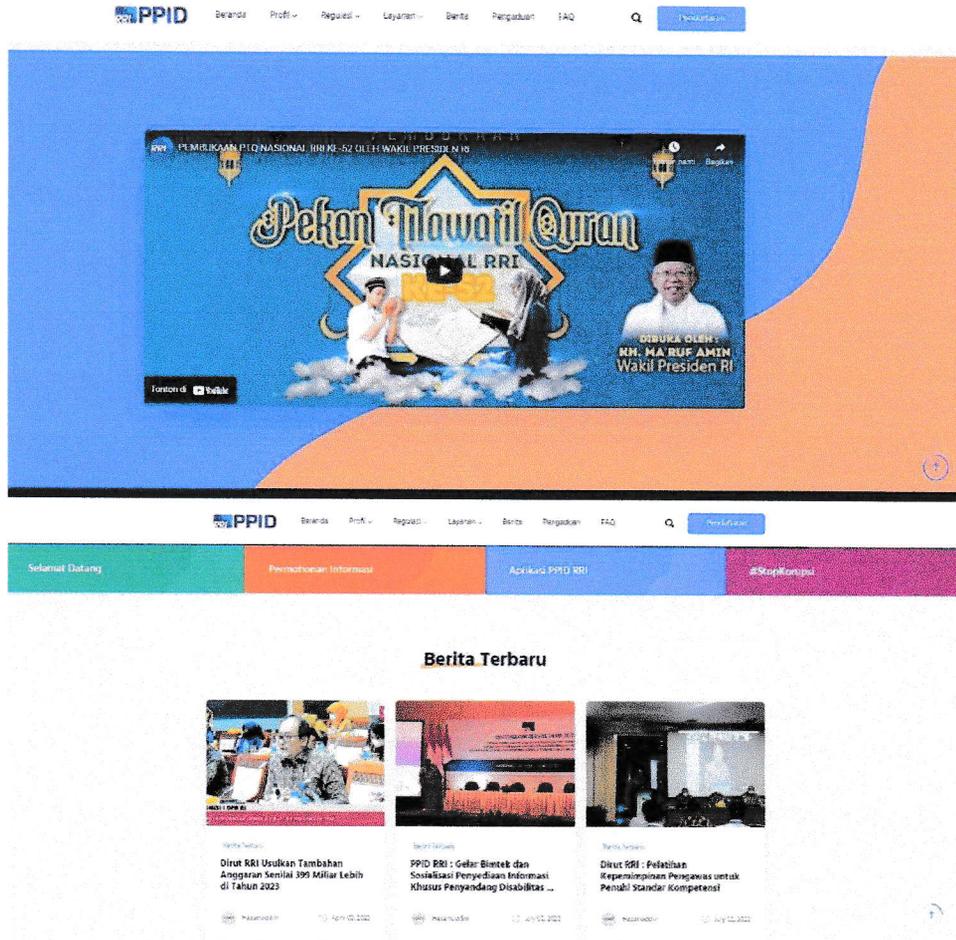


Pada Tahun 2022 PPID LPP RRI melakukan pengembangan penyediaan dan pelayanan informasi publik khusus bagi penyandang disabilitas sensorik rungu wicara, melalui penyediaan informasi publik dengan bahasa isyarat Indonesia (BISINDO).



Di Tahun 2022 PPID LPP RRI juga melakukan redesign homepage website ppid.rrl.co.id dengan menambah fitur dan tampilan warna lebih cerah.





C. RINCIAN PELAYANAN PERMOHONAN

Selama tahun 2022, PPID Lembaga Penyiaran Publik RRI menerima : 1.000 pemohon informasi 100 permintaan yang disampaikan melalui Front Desk Layanan Informasi Publik 900 permohonan melalui aplikasi layanan online Website PPID RRI.

1. REKAPITULASI JUMLAH PEMOHON DAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

NO.	BULAN	JUMLAH PEMOHON INFORMASI	JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI	STATUS			ALASAN PENOLAKAN	
				PENUHI	TOLAK	PROSES	BELUM DIDOKUMENTASIKAN	TIDAK DIKUASAI
1.	JANUARI	97		V				
2.	PEBRUARI	95		V				
3.	MARET	95		V				
4.	APRIL	75		V				
5.	MEI	89		V				
6.	JUNI	55		V				
7.	JULI	85		V				
8.	AGUSTUS	90		V				
9.	SEPTEMBER	93		V				
10.	OKTOBER	89		V				
11.	NOPEMBER	61		V				
12.	DESEMBER	76		V				
	TOTAL :	1.000						

2. JENIS SALURAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

NO	BULAN	FAX/SURAT	DATANG LANGSUNG	EMAIL/DOWNLOAD	TOTAL
1.	JANUARI	-	7	90	
2.	PEBRUARI	-	5	90	
3.	MARET	-	5	90	
4.	APRIL	-	5	70	
5.	MEI	-	9	80	
6.	JUNI	-	5	50	
7.	JULI	-	5	80	
8.	AGUSTUS	-	-	90	
9.	SEPTEMBER	-	3	90	
10.	OKTOBER	-	9	80	
11.	NOPEMBER	-	1	60	
12.	DESEMBER	-	6	70	
	TOTAL	-	-		1.000

3. KLASIFIKASI PEMOHON INFORMASI PUBLIK

NO.	BULAN	INSTANSI	MASYARAKAT UMUM (MAHASISWA, PELAJAR)	LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT	TOTAL
1.	JANUARI		96	1	
2.	PEBRUARI		95		
3.	MARET		95		
4.	APRIL		75		
5.	MEI		89		
6.	JUNI		55		
7.	JULI		85		
8.	AGUSTUS		90		
9.	SEPTEMBER		93		
10.	OKTOBER		89		
11.	NOPEMBER		61		
12.	DESEMBER		76		
	TOTAL		999	1	1.000

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Sepanjang tahun 2020, tidak terjadi sengketa informasi publik. PPID LPP RRI memenuhi semua permintaan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan turunannya.

4. CAPAIAN KINERJA PPID LPP RRI

Hasil Monitoring dan Evaluasi Komisi Informasi Pusat terhadap implementasi keterbukaan informasi publik yang berjalan di lingkungan LPP RRI Tahun 2020, PPID LPP RRI berhasil meraih capaian yang memuaskan dengan mendapat penghargaan dengan kualifikasi tertinggi yakni ; INFORMATIF dengan nilai akhir 91.7733. Adapun penilaian tersebut terdiri dari beberapa indikator diantaranya ; Indikator Pengembangan Website, Indikator Pengumuman Informasi Publik, Indikator Pelayanan Informasi Publik dan Indikator Penyediaan Informasi Publik.



Hasil Monitoring dan Evaluasi Komisi Informasi Pusat terhadap implementasi keterbukaan informasi publik yang berjalan di lingkungan LPP RRI Tahun 2021, PPID LPP RRI kembali berhasil meraih capaian yang memuaskan dengan mendapat penghargaan dengan kualifikasi tertinggi yakni ; INFORMATIF dengan nilai akhir 96.5533.



Sementara hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, LPP RRI kembali meraih predikat sebagai badan publik informatif Tahun 2022 dengan nilai akhir 92,36. PPID Utama LPP RRI Yonas Markus Tuhuleruw menghadiri acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik yang berlangsung Rabu, 14 Desember 2022.





D. PENUTUP

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di LPP RRI adalah sebagai berikut :

1. Pemahaman terhadap UU KIP belum secara optimal merata di seluruh unit kerja atau PPID Pelaksana;
2. Koordinator Unit Kerja yang ditunjuk belum semua berkontribusi secara maksimal, sehingga data dan informasi dari setiap Unit Kerja belum tersedia secara lengkap di Desk Layanan PPID;
3. Pengelolaan database PPID dan Kendala teknis pada Layanan secara online belum semua dipahami oleh operator website PPID

Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha telah memberikan beberapa usulan Kepada Atasan PPID (Direktur Utama LPP RRI) sebagai upaya penguatan PPID di lingkungan LPP RRI, diantaranya ;

1. Tersedianya tenaga fungsional pranata humas, arsiparis dan komputer serta anggaran khusus untuk PPID RRI yang memadai.
2. Penguatan kapasitas dan kualitas SDM PPID RRI dengan menggelar Bimbingan Teknis di Bidang Pelayanan Informasi, Bidang Dokumentasi dan Arsip serta Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa.
3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi.

Demikian laporan tahunan ini disusun secara ringkas sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID LPP RRI.

Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha,
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Lembaga Penyiaran Publik RRI,

Yonas Markus Tuhuleruw